

TIGA MODEL PERAN STRATEGIS PESANTREN DI INDONESIA

MADEKHAN

Madekhan@gmail.com,
Universitas Islam Lamongan

Abstract:

Kajian ini berupaya menggambarkan bagaimana pesantren saat ini dituntut untuk melakukan pembaruan perannya di masyarakat. Melalui studi kepustakaan, dihasilkan sejumlah kerangka konseptual terkait peran pesantren yang sesuai kondisi kekinian di Indonesia. Melalui model analisis pembelajaran yang selama ini diterapkan di pesantren, ditemukan bahwa pesantren semakin banyak mengadopsi pola dan muatan pembelajaran lembaga-lembaga pendidikan di luarnya. Hal ini terjadi didorong oleh upaya Pesantren untuk lebih berperan menyiapkan alumninya mampu memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Implikasi dari gerakan pembaruan peran, muncul tiga model peran, yaitu Model 1, lembaga pendidikan, dimana selain berperan sebagai lembaga pendidikan Islam, pengembangan keilmuan, dan kepelatihan life skill santri. Model 2, Pesantren Sebagai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Model 3, pesantren sebagai sentra pendidikan kewirausahaan.

Keywords: Model Peran, Pesantren

Pendahuluan

KH. Abdurrahman Wahid memperkenalkan pesantren sebagai *a place where student (santri) live*. Definisi yang masih sangat sederhana tersebut, dijabarkan oleh Zamakhsyari Dhofir dalam desertasinya “Tradisi Pesantren” menyebut lima elemen dasar dari tradisi pesantren, yaitu adanya (1) tempat tinggal santri yang dikenal dengan pondok, (2) masjid (tempat shalat), (3) santri, (4) pengajaran kitab-kitab klasik, dan (5) kyai-ulama sebagai pengasuh¹. Kelima elemen dasar itu menyatu dalam kompleks pesantren.

Di Indonesia, jumlah pesantren terus meningkat pesat. Berdasarkan data Kementerian Agama, sampai tahun 2015 terdapat 27.290 pesantren di Indonesia dengan jumlah santri mencapai 3.654.096 orang, dengan rincian 1.873.698 santri laki-laki dan 1.780.398 santri perempuan². Alumnusnya mencapai puluhan juta orang dan tersebar di seluruh pelosok tanah air. Fakta itu menunjuk-kan bahwa pesantren merupakan kekuatan potensial dan luar biasa yang dimiliki bangsa Indonesia. Perannya bagi kemajuan negara sungguh tak ternilai harganya.

Tahun	Jumlah	Jumlah
-------	--------	--------

¹ Zamakhsyari Dhofir, 1994, dalam KH. Husain Muhammad, *Perempuan, Islam, dan Negara*, Qalam Nusantara, Yogyakarta, 2016.

² Pusat Data Kementerian Agama, 2015.

	pesantren	santri
1977	4.195	677.384
1981	5.661	938.397
1985	6.239	1.084.801
1997	9.388	1.770.768
2001	11.312	2.7737.805
2012	27.230	3.004.807
2015	27.290	3.654.096

Tabel 1. Jumlah Pesantren dan Santri 1977-2015

Menariknya, buku tentang pesantren sudah banyak ditulis dan kajian tentangnya sudah banyak dilaksanakan, tetapi dengan berjalannya waktu keperluannya tidak semakin surut. Hal ini terutama dibuktikan dengan munculnya berbagai pandangan praktisi sosiologi dan pendidikan yang melihat semakin strategisnya lembaga pendidikan pesantren dalam proses integrasi dan pemberdayaan sosial. Jangkauan pesantren yang luas, kedekatannya dengan komunitas, dan kemampuannya membangun pembelajaran lintas generasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia yang sedang dalam masa transisi. Di situ pesantren menemukan fokusnya pada upaya melahirkan lulusan yang tidak hanya mengandalkan pengakuan, melainkan yang dapat bertumpu pada kejituan bertindak dalam perilaku yang berwatak.

Bila membatasi pada rekam jejak keberadaan pesantren di Jawa Timur, maka secara jelas bahwa pesantren di Provinsi ini semakin luas menjangkau segi-segi kehidupan masyarakat yang semakin beragam. Model pembelajarannya pesantren juga semakin banyak mengadopsi pola dan muatan pembelajaran lembaga-lembaga pendidikan di luarnya. Perpaduan antara sistem pendidikan nasional dan sistem pendidikan pesantren semakin mengungkapkan kejituan konseptual di

bidang pendidikan yang akhir-akhir ini sedang diperjuangkan oleh banyak pihak.

Wajar jika sebagai salah satu lembaga penyelenggara pendidikan nasional, situasi mutakhir menunjukkan bahwa masyarakat semakin menaruh harapan besar akan peran Pesantren. Optimisme masyarakat akan peran pesantren tentu harus dikaitkan dengan multifungsi dan karakter pesantren; yaitu sebagai lembaga *tafaqquh fi ad-din*, lembaga pendidikan dan pengembangan masyarakat, lembaga yang mandiri, dan *indigenous culture* yang berakar di masyarakat. Intinya, perbincangan tentang pesantren akan bermuara pada pengakuan bahwa pesantren tidak hanya sebagai lembaga pendidikan, melainkan juga lembaga yang memiliki peran strategis pemberdayaan masyarakat.

Peran strategis demikian, pada konteks saat ini sangat berkait dengan permasalahan kemiskinan di Indonesia. Salah satunya adalah bagaimana Pesantren mampu –selain mengembangkan intelektualitas dan karakter santrinya– juga mengembangkan kapasitas kecakapan hidup (*lifeskill*). Hal ini mengacu pada munculnya kenyataan data Depdiknas 2014 yang menunjukkan bahwa sekitar 88,4% lulusan SLTA tidak melanjutkan ke PT, dan 34,4% lulusan SLTP tidak melanjutkan ke SLTA. Mereka setiap tahun menambah jumlah deretan pencari kerja, sementara bekal untuk kesiapan kerja belum dimiliki.

Dari luar negeri tantangan akan muncul dengan disepakatinya AFTA (*Asean Free Trade Area*), AFLA (*Asean Free Labour Area*) dan terakhir Masyarakat Ekonomi Asean tahun 2015. Konsekuensinya adalah tenaga kerja kita dalam berbagai sektor kehidupan harus mampu bersaing dengan tenaga kerja asing

dari negara-negara tetangga di lingkungan ASEAN.

Melihat kondisi tersebut, maka dunia Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan diharapkan turut berperan lebih aktif menyiapkan sumberdaya manusia terdidik yang mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan baik lokal, regional, nasional maupun internasional. Alumni pesantren tidak cukup hanya menguasai teori-teori, tetapi juga mau dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sosial. Selain mampu menerapkan ilmu yang diperoleh di pesantren juga mampu memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan yang demikian adalah pendidikan yang berorientasi pada pembentukan jiwa kewirausahaan, ialah jiwa keberanian dan kemauan menghadapi problema hidup dan kehidupan secara wajar, jiwa kreatif untuk mencari solusi dan mengatasi problema tersebut, jiwa mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Salah satu jiwa entrepreneurship yang perlu dikembangkan melalui pendidikan pada anak usia pra sekolah dan sekolah dasar, adalah kecakapan hidup (lifeskill).

Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan

Pesantren mengemban beberapa peran, utamanya sebagai lembaga pendidikan. Jika ada lembaga pendidikan Islam yang sekaligus memainkan peran sebagai lembaga bimbingan keagamaan, keilmuan, kepelatihan, pengembangan masyarakat, dan sekaligus menjadi simpul budaya, maka itulah pondok pesantren. Biasanya peran-peran tersebut tidak langsung terbentuk, melainkan melewati tahap demi tahap. Setelah sukses sebagai lembaga pendidikan pesantren bisa pula menjadi lembaga keilmuan, kepelatihan, dan pember-dayaan masyarakat.

Keberhasilannya mem-bangun integrasi dengan masyarakat barulah memberi mandat sebagai lembaga bimbingan keagamaan dan simpul budaya.

Sebagai lembaga pendidikan, pengembangan apapun yang dilakukan dan dijalani oleh pesantren tidak mengubah ciri pokoknya sebagai lembaga pendidikan dalam arti luas. Ciri inilah yang menjadikannya tetap dibutuhkan masyarakat. Disebut dalam arti luas, karena tidak semua pesantren menyelenggarakan madrasah, sekolah, dan kursus seperti yang diselenggarakan lembaga pendidikan di luarnya. Keteraturan pendidikan di dalamnya terbentuk karena pengajian yang bahannya diatur sesuai urutan penjenjangan kitab. Penjenjangan itu diterapkan secara turun temurun membentuk tradisi kurikuler yang terlihat dari segi standar-standar isi, kualifikasi pengajar, dan santri lulusannya³.

Sementara perkembangan mutakhir yang mendorong pesantren mengadopsi sosok lembaga pendidikan umum, membuat mereka menghadapi persoalan komposisi muatan kurikulum. Biasanya yang dipilih adalah 70%:30% untuk muatan keagamaan dan non keagamaan, atau 50%:50%. Pesantren-pesantren yang telah berhasil menyelenggara-kan pendidikan umum dapat mengatur terselenggaranya madrasah berkurikulum pemerintah, madrasah diniyah berkurikulum pesantren, dan pembelajaran pesantren sebagaimana mestinya⁴.

³ M. Dian Nafi, et al, Praksis Pembelajaran Pesantren, 2007.

⁴ Dalam buku Ahmad Zaini, 1998, KH. Abdul Wahid Hasyim tercatat sebagai orang yang pertama melakukan pembaharuan pendidikan Islam dengan mendirikan Madrasah Nidzamiyah di Pesantren Tebuireng Jombang. Di saat pesantren NU lainnya

Segmentasi masyarakat tampak sudah mulai terbentuk dengan kehadiran jalur pendidikan yang beragam di pesantren.

Ciri kurikulum pesantren memadukan penguasaan sumber ajaran yang *ilahi* (bersumber dari Allah SWT) menjadi peragaan individual untuk disemaikan ke dalam hidup bermasyarakat. Selain mengenai ranah (pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotor (perilaku) dalam pengajarannya, sejak lama pesantren mendasarkan diri pada tiga ranah utama yaitu *faqahah* (kecukupan atau kedalaman pemahaman agama), *Thabi'ah* (perangai, watak, atau karakter), dan *kafa'ah* (kecakapan operasional). Jika pendidikan merupakan upaya perubahan, maka yang berubah dan diubah adalah tiga ranah tersebut, tentu saja perubahan ke arah yang lebih baik⁵.

Tipologi penyelenggaraan pendidikan di pesantren saat ini hampir semuanya telah mengadaptasi tuntutan modernitas. Pesantren tidak lagi hanya menyediakan tempat bagi pendidikan keagamaan dalam rangka mencetak ulama, kyai, atau ahli dalam bidang ilmu-ilmu agama. Tetapi saat ini dari Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) yang disejajarkan dengan SD, SMP, dan SMA. Sebagian pesantren juga didirikan dalam bentuk dan suasana yang lebih modern, mulai dari aspek sarana, prasarana,

penataan lingkungan, sanitasi, metode, sampai ke sistem pengajaran⁶.

Pesantren Sebagai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Jarang pesantren berkembang dalam waktu yang singkat dan langsung bersekala besar, karena setiap tahapan dipahami sebagai membutuhkan penjiwaan. Kebesaran pesantren akan terwujud bersamaan dengan meningkatnya kapasitas pengelola pesantren dan jangkauan program di masyarakat. Karakteristik inilah yang dapat dipakai untuk memahami watak pesantren sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat.

Dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat itu pesantren pada umumnya benar-benar mandiri dan lebih selektif pada lembaga penyandang dana dari luar masyarakatnya sendiri. Hal itu terutama setelah tahun 1980-an banyak kegiatan pengembangan masyarakat tidak menubuh kedalam perkembangan pesantren sendiri, sehingga dirasakan menempel saja tanpa pembaharuan dari dalam pesantren. Inovasi teknis terjadi dibanyak masyarakat pesantren. Tetapi inovasi sosialnya tidaklah begitu memenuhi harapan⁷.

Pengalaman itu menjadi latar belakang kritik atas wacana pengembangan masyarakat di pesantren. Jenis pengembangan masyarakat yang lebih menjadikan masyarakat pesantren sebagai pasar bagi produk asing menjadi sorotan tajam. Konsep pengembangan masyarakat pun diganti dengan pemberdayaan masyarakat. Dalam konsep

mengharamkan segala hal yang berbau Barat (Belanda) dia mulai memasukkan pelajaran-pelajaran yang dianggap haram seperti Ilmu Bumi, Bahasa Belanda, Sejarah Indonesia, dan Ilmu Hayat di madrasah ini.

⁵ M. Dian Nafi, *Sekilas Kurikulum Ponsok Pesantren Al Muayyad, Makamhaji, Kertasura, Sukoharjo, Jawa Tengah*, 1996.

⁶ KH. Husain Muhammad, *Perempuan, Islam, dan Negara*, Qalam Nusantara, Yogyakarta, 2016

⁷ M. Dian Nafi, 2007

ini termuat pen-dekatan yang lebih memampukan masyarakat, yaitu yang dapat memperbaiki tata kuasa, tata kelola dan tata guna sumber daya yang ada pada masyarakat pesantren. Didalam pemberdayaan masyarakat itu pesantren berteguh pada lima asas yaitu:

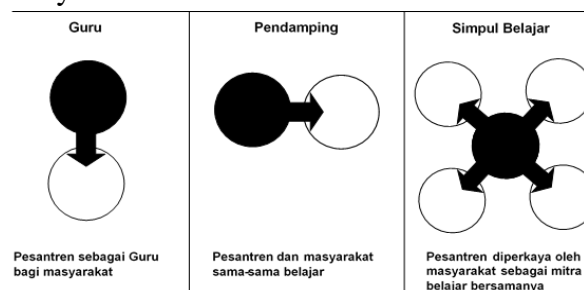
1. Menempatkan masyarakat sebagai pelaku aktif bukan sasaran pasif
2. Penguatan potensi lokal baik yang berupa karakteristik, pranata dan jejaring.
3. Peran serta warga masyarakat sejak peren-canaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan refleksi dan evaluasi
4. Terjadinya peningkatan kesadaran; dari kesadaran semu dan kesadaran naif, kesadaran tipis dan
5. Berkesinambungan setelah program ber-akhir

Pemberdayaan masyarakat melalui pesantren menjadi menarik, karena berlangsung dalam ketenangan dan sekaligus kekritisn. Tenang karena perubahan gradual sudah menjadi wataknya. Kritis karena pesantren sudah terbiasa mempersoalkan segi-segi dasariah dari praktek hidup di sekelilingnya. Kitab-kitab belajar sumber santri biasanya diawali dengan *ta'rif* atau definisi dari pokok-pokok yang dipelajari. Kebiasaan ini terbawa serta saat masyarakat santri melihat lingkungan dan realitas sekelilingnya. Faktor pendukung ketenangan dan kekritisn itu adalah peran pokok pesantren sebagai lembaga pendidikan, yang kemudian ditopang dengan perannya sebagai lembaga keilmuan, lembaga bimbingan keagamaan, dan lembaga pelatihan.

Sebagai lembaga pendidikan, pesantren percaya bahwa manusia akan meningkat martabatnya seiring dengan

penguatan nilai-nilai dalam dirinya. Penanaman atau penumbuhan nilai-nilai dalam pribadi dan masyarakat membutuhkan waktu penyemaian yang tidak bias disebut sebentar. Gambarannya sering mengambil perumpamaan dari bayi, remaja, dewasa awal, dewasa dan tua⁸. Sebagai lembaga keilmuan, pesantren percaya bahwa nilai-nilai kebenaran tidaklah terbangun secara serta merta karena untuk memahami keseluruhan dalil, *uswah*, dan kesaksian harus disertai pula dengan *tahqiq* (pembuktian) dan *tabayyun* (Klarifikasi). Sebagai lembaga pelatihan, pesantren percaya bahwa tidak ada cara instan untuk memampukan peserta didik secepat memprogram perangkat komputasi.

Kekritisn pesantren terbangun oleh wataknya yang merekam banyak hal sekaligus bahkan dalam rentang pewarisan yang panjang. Perubahan-perubahan sosial dan pasang surut penghidupan warga masyarakat tidak luput dari perhatiannya karena pesantren hidup di dalam masyarakat itu. Tidak heran banyak kyai dan kalangan pesantren peka akan “tanda-tanda zaman” sebagai buah dari keterikatan dengan denyut dinamika masyarakat itu.



Gambar 10.1 : Tiga Pola Hubungan Pesantren dan Masyarakat

Pesantren Sebagai Sentra Pendidikan Kewirausahaan

⁸ Ibid, 204

Dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai 1,3 persen per tahun atau tiga juta jiwa per tahun membuat beban Indonesia semakin berat. Laju pertumbuhan penduduk yang begitu tinggi memberi dampak luas bagi penyediaan pangan, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Belum lagi jumlah penduduk miskin dan pengangguran masih tinggi. Problem yang muncul tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi dan ketenagakerjaan, tetapi mempunyai implikasi lebih luas, mencakup aspek sosial, psikologis, dan bahkan politik. Di tengah himpitan beban berat itu, pesantren diharapkan bisa berperan sebagai basis pembangunan wilayah yang strategis.

Di samping itu, pesantren mesti memproduksi generasi muda yang piawai di bidang kewirausahaan mandiri. Melahirkan pengusaha yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual adalah respons lembaga pendidikan agama seperti pesantren. Lembaga keagamaan ini bisa dijadikan alat untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat perdesaan. Koperasi pesantren, misalnya, sangat berpotensi untuk mencetak wirausaha baru atau peluang usaha baru.

Kini, mengatasi kemiskinan tidak bisa hanya dalam bentuk pemberian bantuan subsidi dan santunan. Kemiskinan hanya bisa diatasi dengan menciptakan peluang kerja. Dari sekitar 27.000 pesantren, sekitar 4.000 di antaranya memiliki koperasi pondok pesantren yang berbadan hukum. Kekuatan ini akan menjadi raksasa bila dikembangkan secara optimal dan maksimal. Dengan jutaan santri yang dimilikinya, pondok pesantren bisa menjadi lembaga pendidikan yang potensial untuk mengurangi angka pengangguran. Salah satu caranya,

pesantren tak hanya menjadi tempat menimba ilmu keagamaan, tetapi juga perlu melakukan diversifikasi program dengan beragam kegiatan *lifeskill* kewirausahaan dan wawasan bisnis.

Pesantren memiliki potensi untuk berkembangnya usaha mikro di negeri ini. Anggaran Rp. 20 triliun lewat kredit usaha rakyat (KUR) harus menyertakan pesantren dalam membangun fondasi perekonomian nasional. Mengikutsertakan pesantren dalam pengelolaan usaha mikro, kecil, dan menengah, dapat meringankan beban perekonomian bangsa ke depan. Selain menyumbang PDB Rp. 1.505,3 triliun (30,3 persen), sektor usaha mikro mampu menyerap 83.647.711 tenaga kerja (89,3 persen). Jumlah usaha mikro di Indonesia sekitar 50,70 juta usaha atau 98,9 persen⁹. Ini potensi yang tak bisa diabaikan lembaga keagamaan berbasis pesantren. Selain persoalan keagamaan, peran pesantren mesti dikontekstualisasikan ke dalam penanggulangan masalah perekonomian warga sekitarnya.

Seiring dengan kuatnya modernisasi pondok pesantren, rekonstruksi peran pondok pesantren yang tadinya hanya mempelajari kitab-kitab Islam klasik, kiranya dapat diberdayakan secara maksimal sebagai agen pembangunan perekonomian lokal, wilayah, hingga nasional. Melalui pendekatan tersebut, sumber daya atau unsur-unsur pondok pesantren (kiai/guru, masjid, santri, pondok, kitab-kitab klasik, hingga ilmu pengetahuan) didayagunakan dalam bentuk pendidikan *life skill* untuk mencetak manusia yang memiliki ilmu

⁹ BPS 2015

pengetahuan, potensi kemasyarakatan, dan pembangunan wilayah.

Hal ini berujung pada penciptaan sumber daya manusia yang berdaya saing dan produktif. Dengan demikian, pondok pesantren tidak hanya menjadi penempa nilai-nilai spiritual, tetapi juga mampu meningkatkan kecerdasan sosial dan keterampilan dalam membangun wilayahnya. Mengimplementasi-kan visi dan misi pesantren wirausaha adalah dengan memadukan khazanah ilmu keislaman, wawasan bisnis, dan praktik usaha di bidang ekonomi secara kreatif¹⁰.

Setiap santri mendapat kurikulum yang memadukan ilmu fikih, filsafat, tauhid, tafsir, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta pengetahuan ilmu ekonomi dengan fasilitas untuk mempraktikkan usaha di berbagai sub sektor ekonomi kreatif. Alhasil, setelah lulus dari pesantren mereka dapat mendirikan badan usaha pada salah satu dari empat belas subsektor industri kreatif. Di sini diyakini bahwa pesantren akan menjadi basis penting dalam mengatasi pengangguran bila pendidikan keagamaan dilengkapi dengan pendidikan keterampilan dan keahlian.

Selain memiliki Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN), sudah saatnya pesantren juga memiliki semacam Balai Latihan Kerja (BLK) untuk menempa santri dengan beragam keahlian. Sehingga kelak ketika lulus dari pesantren, santri sudah bisa hidup mandiri dan membuka lapangan pekerjaan serta terserap lapangan pekerjaan karena memiliki keahlian. Dengan menguasai pengetahuan dan keterampilan, alumnus pesantren dapat

berperan sebagai *driving force* masyarakatnya.

Kesimpulan

Terdapat tiga model peran pesantren yang saat ini memiliki urgensi untuk dikembangkan sesuai kebutuhan pembangunan di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari upaya pesantren menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat, tanpa melepaskan khasanah pendidikan Islam klasik yang menjadi ciri khasnya. Tiga model peran pesantren yang telah memiliki landasan konseptual dan empiris sampai saat ini adalah;

- a. **Model 1**, Pesantren sebagai lembaga pendidikan. Peran pendidikan di pesantren saat ini cenderung mengikuti kerangka kurikulum pendidikan nasional di dalam madrasah atau sekolah umumnya. Untuk menjaga muatan keagamaan, mereka menyelenggarakan pendidikan madrasah diniyah berkurikulum pesantren, dan pembelajaran pesantren sebagaimana mestinya.
- b. **Model 2**, Pesantren Sebagai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Dalam konsep ini termuat pendekatan yang lebih me-mampukan masyarakat, yaitu yang dapat memperbaiki tata kuasa, tata kelola dan tata guna sumber daya yang ada pada masyarakat pesantren. Lembaga keagamaan ini bisa dijadikan alat untuk memberdaya-kan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat perdesaan. Koperasi pesantren, misalnya, sangat berpotensi untuk mencetak wirausaha baru atau peluang usaha baru.
- c. **Model 3**, pesantren sebagai sentra pendidikan kewirausahaan. Pondok pesan-tren tidak hanya menjadi penempa nilai-nilai spiritual, tetapi

¹⁰ Iu Ruslana, Menggagas Pesantren Wirausaha, Pikiran Rakyat edisi 24 November 2009

juga mampu meningkatkan kecerdasan sosial dan keterampilan dalam membangun wilayah-nya. Pesantren akan menjadi basis penting dalam mengatasi pengangguran bila pendidikan keagamaan dilengkapi dengan pendidikan keterampilan dan keahlian.

Daftar Pustaka;

Ahmad Zaini, *Kyai Haji Abdul Wahid Hasyim: His Contribution to Muslim Education Reform and Indonesian Nationalism during the Twentieth Century*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.

Iu Ruslana, *Menggagas Pesantren Wirausaha, Pikiran Rakyat* edisi 24 November 2009.

Jamhari dan Jajat Burhanudin, *Pesantren Mapping in Indonesia: A Brief Mapping of Islamic Education in Indonesia*

Kementerian Agama RI, *Buku Statistik Pendidikan Islam*, Jakarta, 2015.

KH. Husain Muhammad, *Perempuan, Islam, dan Negara, Qalam Nusantara*, Yogyakarta, 2016

M. Dian Nafi, *Sekilas Kurikulum Ponsok Pesantren Al Muayyad, Makamhaji, Kertasura, Sukoharjo, Jawa Tengah*, 1996.

M. Dian Nafi, et al, *Praksis Pembelajaran Pesantren*, PP Annuqayah, Sumenep, 2007.